

RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



TAHUN 2023

**PEMERINTAH
KABUPATEN KEDIRI**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mampu menjalankan perannya sebagai pelaksana arahan kebijakan pemerintah Kabupaten Kediri dalam bidang Komunikasi dan Informatika, dengan telah disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2023.

Rencana kerja tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2023 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri selama tahun 2023.

Dalam urusan Komunikasi dan Informatika Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kediri, - - 2023

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri**

SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19690223 198903 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	49
3.3 Program dan Kegiatan.....	52
BAB IV. RENJA DAN PENDANAAN SKPD.....	69
BAB V. PENUTUP.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan penandaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan RENJA Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang pada hakikatnya dapat mempermudah setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual Organisasi Perangkat Daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian danantisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).

Di dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal Organisasi Perangkat Daerah, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

Di dalam Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif serta perkiraan maju. Indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai di dalam RPJMD, sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Selain Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Adapun Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih hasil pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun yaitu: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasional-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani". Yang dirumuskan secara umum dalam Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan

5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
6. Optimalisasi Kepariwisata berbasis Kearifan Lokal
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Seluruh dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Rencana kerja merupakan penjabaran dari RENSTRA dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat daerah, adalah sebagai berikut;

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD 2023;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang membidangi pembangunan dan penyebarluasan informasi, pengembangan dan pemberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi merupakan aspek yang menjanjikan fasilitasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat, organisasi termasuk dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik serta mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik elektronik government (E-gov) yang dimaknai sebagai penyelenggara pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar mendapatkan hasil yang optimal maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat rancangan belanja dinas, prioritas kegiatan dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Tugas dan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
35. Peraturan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 53);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk tahun 2023 ke depan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kediri.

Adapun maksud penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberi arah dan pedoman kepada setiap aparatur di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam menjalankan program selama tahun 2023 untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan.
2. Menjadikan rencana kerja sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri di tahun 2023.
3. Merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada tahun 2023.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang komunikasi informatika, persandian, dan statistik di tahun 2023 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun antar sektor dan sub sektor terkait.
2. Memberikan pilihan-pilihan kebijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.
3. Memasukkan program/kegiatan yang ada di RENJA ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Dokumen Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023 ini disusun sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN SKPD

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran termasuk total kebutuhan dana/pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Penutup berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan serta kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Tahun berjalan 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun Lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program /kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dan waktu yang ditentukan dalam upaya melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel : 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Kediri
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan Renja PD 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2	16	Komunikasi dan Informatika								
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
2	16	01	2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2	16	01	2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen			3 dokumen	3 dokumen	
2	16	01	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan			1 dokumen	1 dokumen	

					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2	16	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	16	01	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/bulan		14 bulan	14 bulan	100%	44 orang/bulan		
2	16	01	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen		13 bulan	13 bulan	100%	34 orang/bulan		
2	16	01	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	24 orang/bulan		
2	16	01	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 dokumen		
2	16	01	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 laporan		14 laporan	14 laporan	100%	14 dokumen		
2	16	01	2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen		2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen		
2	16	01	2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
2	16	01	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 unit		
2	16	01	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	2 orang/bulan		

2	16	01	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	16	01	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prosentase peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan			50%	0,95%	1,90%			
2	16	01	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	16	01	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket		4 komponen	4 komponen	100%	4 dokumen		
2	16	01	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket		4 peralatan/perlengkapan	4 peralatan/perlengkapan	100%	4 dokumen		
2	16	01	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket		4 peralatan	4 peralatan	100%			
2	16	01	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket		4 bahan	4 bahan	100%	4 dokumen		
2	16	01	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket		4 barang cetakan/penggandaan	4 barang cetakan/penggandaan	100%	4 dokumen		
2	16	01	2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen		4 bahan	4 bahan	100%	4 dokumen		
2	16	01	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan		20 rapat koordinasi/konsultasi	11 rapat koordinasi/konsultasi	55%	20 kegiatan		
2	16	01	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	16	01	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit							

2	16	01	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	16	01	2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan		12 bulan	12 bulan	100%	1 orang/bulan	
2	16	01	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	
2	16	01	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan						
2	16	01	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	16	01	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perprangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit		14 unit	14 unit	100%	14 unit	
2	16	01	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit		16 peralatan/ mesin	16 peralatan/mesin	100%	16 unit	
2	16	02		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik								
2	16	02	2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2	16	02	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	12 dokumen		60 orang	30 orang	50%	60 orang	
2	16	02	2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen	5 dokumen		80 orang	40 orang	50%	80 orang	

2	16	02	2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dikelola	500 dokumen		825 konten	965 konten	116,97%	850 konten		
2	16	02	2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi	46 dokumen		6 kegiatan	1 kegiatan	16,67%	6 kegiatan		
2	16	02	2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kerjasama dengan media elektronik dan portal online	6 dokumen		40 media elektronik dan portal online	60 media elektronik dan portal online	150%	40 media elektronik dan portal online		
2	16	02	2	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerja sama dengan media cetak	45 layanan		45 media cetak	35 media cetak	77,78%	45 media cetak		
2	16	02	2	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	16 dokumen							
2	16	02	2	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta pelatihan kapasitas sumber daya komunikasi publik	70 orang		80 orang	34 orang	43,75%	80 orang		
2	16	02	2	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah peserta pelatihan SDM dan sinkronisasi PPID			170 orang	0 orang	0%	170 orang		
2	16	02	2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah peserta bakoinmas	130 orang		130 orang	40 orang	30,77%	130 orang		
2	16	02	2	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	1 unit							
2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									
2	16	03	2	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	03	2	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota	1 domain					150 domain/sub domain		

2	16	03	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 dokumen					100 domain/sub domain		
2	16	03	2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	03	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 dokumen		1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
2	16	03	2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	1 unit		95%	95%	100%	95%		
2	16	03	2	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	1 dokumen			-	0%	125 kegiatan vidcon		
2	16	03	2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	10 unit		1 aplikasi	1 aplikasi	100%	10 aplikasi		
2	16	03	2	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 layanan					15%		
2	16	03	2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	8 dokumen		70 aparatur, 80 masyarakat	200 aparatur	133,33%	70 aparatur, 80 masyarakat		

2	16	03	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	6 dokumen		6 paket	6 paket	100%	6 paket		
2	16	03	2	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen pengelolaan government chief information officer(GCIO)	1 dokumen					1 paket		
2	16	03	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	1 dokumen					1 kegiatan		
2	20			STATISTIK									
2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral									
2	20	02	2	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
2	20	02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 dokumen		1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan		
2	20	02	2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 dokumen		2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan		
2	21			PERSANDIAN									
2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi									

2	20	02	2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	20	02	2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	6 laporan		1 paket	1 paket	100%	1 paket		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Pencapaian kinerja mengacu pada Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai sasaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran dan target masing masing indikator yang akan dicapai dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisa target yang telah dicapai pada masing-masing indikator sasaran dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Kominfo diatas bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya SKPD yang berbasis e-Government
 - a) Persentase SKPD yang berbasis e-Government mencapai 100%, menggambarkan seluruh SKPD sudah memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan. Dari 65 SKPD semuanya sudah memanfaatkan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kominfo yang bekerja sama dengan dinas terkait sebagai leading sector.
 - b) Jumlah ruang publik yang terlayani wifi sebanyak 51 titik, hanya mencapai 51% kurang dari yang ditargetkan di tahun 2021 sebanyak 100. Namun layanan free wifi di ruang publik yang terbangun sudah disesuaikan dengan kebutuhan ruang publik dengan mempertimbangkan fungsi strategis yang ada di area layanan tersebut
 - c) Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab yang ditargetkan 1 Gbps tercapai 51% yaitu 510 Mbps, sama seperti tahun 2020. Meskipun secara kinerja mencapai 51% dari target namun tingkat kecepatan ini sudah memenuhi kebutuhan layanan bandwidth dan mampu mendukung kinerja sistem informasi yang ada di Kabupaten Kediri secara keseluruhan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
 - a) Persentase desa yang membentuk KIM mencapai 57,8%. Saat ini kegiatan KIM lebih difokuskan pada pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ada, untuk memaksimalkan potensinya.

- b) Persentase PPID aktif pada SKPD sebesar 100%. Semua SKPD di Pemkab Kediri sudah memiliki PPID Pembantu dan berfungsi dalam layanan informasi publik. Namun permintaan informasi memang lebih banyak dilakukan masyarakat langsung ke PPID Utama yang ada di Dinas Kominfo.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
- a. Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi mencapai 160%. Dari yang ditargetkan 600/tahun terealisasi 965/tahun.
 - b. Jumlah update pada media pemerintah daerah terealisasi sebesar 100%. Masih sama dengan tahun 2020 yaitu mencapai 10 kali per hari. Hal ini karena didukung dengan adanya media sosial seperti instagram, facebook, dan twitter yang juga aktif digunakan selain website pemerintah.
 - c. Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (content viewer) di tahun 2021 terealisasi 96% dari yang ditargetkan 20jt/tahun. Capaian ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, yaitu dari 18,6 jt/tahun menjadi 19,2 jt/tahun.

Pencapaian sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo tahun 2021 yang capaian kinerjanya bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah 100% terealisasi 100%. Program tersebut didukung oleh 7 kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pememerintahan Daerah. Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda yang Disediakan target 12 bulan terealisasi 12 bulan.
 - b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dengan target 30 Unit terealisasi 30 Unit.
 - c. Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen.
 - d. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 20 dokumen terealisasi 20 dokumen.

- e. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen.
 - f. Administrasi umum perangkat daerah. Presentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dengan target 30 dokumen terealisasi 30 dokumen.
 - g. Administrasi kepegawaian perangkat daerah. Presentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 50 % terealisasi 0,95%
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- Dengan indikator program yaitu Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%. Program tersebut didukung 1 kegiatan :
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah informasi yang terkelola dengan target 825 konten terealisasi 965 konten.
3. Program Aplikasi Informatika
- Dengan indikator program yaitu Cakupan layanan jaringan intra pemerintah daerah dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%. Program tersebut didukung 1 kegiatan :
- a. Pengelolaan e-government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang terkelola dengan target 170 sistem terealisasi 170 sistem informasi.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Dengan Indikator program yaitu ketersediaan statistik sektoral dilingkup daerah dengan target terdapat ketersediaan statistik sektoral dan terealisasi dengan capaian 100%. Program tersebut didukung 1 kegiatan :
- a. Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota. Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah dengan target 1 paket data statistik sektoral terealisasi 1 paket data statistik sektoral.
5. Program Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan Informasi
- Dengan indikator program yaitu jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%. Program tersebut didukung 1 kegiatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan Persandiaan untuk Pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota. Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman dengan target 1 paket terealisasi 1 paket.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut. Tabel 2.2.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase SKPD yang berbasis e-government			100%	100%			100%	100%			Seluruh SKPD sudah memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan pemerintahan
	Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi			91	100			20	51			Jumlah ruang publik yang dilayani wifi kurang dari yang ditargetkan pada tahun 2021 namun layanan free wifi di ruang publik yang terbangun sudah disesuaikan dengan kebutuhan ruang publik.
	Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab			1 Gbps	1 Gbps			510 Mbps	510 Mbps			Tingkat kecepatan ini sudah memenuhi kebutuhan layanan bandwidth dan mampu mendukung kinerja sistem informasi yang ada di kabupaten Kediri secara keseluruhan.

2	Persentase desa yang membentuk KIM			100%	100%			57,8%	57,8%			Lebih difokuskan pada pembinaan KIM yang sudah ada untuk memaksimalkan potensinya
	Persentase PPID aktif pada SKPD			100%	100%			100%	100%			Semua PPID di SKPD berfungsi dalam layanan informasi publik
3	Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi			600/tahun	600/tahun			785/tahun	965/tahun			Realisasi melebihi target Renstra
	Jumlah update pada media pemerintah daerah			10 kali/hari	10 kali/hari			10 kali/hari	10 kali/hari			Realisasi sama dengan tahun sebelumnya
	Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab (<i>content viewer</i>)			20jt/tahun	20jt/tahun			18,6jt/tahun	19,2jt/tahun			Capaian melebihi tahun sebelumnya
4	Indeks SPBE				3,88	4,04	4,28		3,12	3,50	3,60	Ketika target dibuat masih memakai indikator lama Permenpan RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Untuk pengukuran mulai tahun 2021 memakai indikator baru sesuai Permenpan No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

5	Indeks kategori PPID				E	D	C		E	C	B	Diupayakan Peningkatan implementasi PPID terhadap UU KIP untuk mencapai nilai indeks yang ditargetkan
---	----------------------	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1) Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Bidang yang mengampu urusan pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yaitu meliputi: Komunikasi dan Informatika, urusan persandian, dan urusan statistik.

Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam bidang Komunikasi dan informatika mempunyai bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Kediri sehingga terciptanya tata pemerintahan yang baik. Terwujudnya pemenuhan pelayanan dibidang komunikasi dan informatika merupakan sasaran utama guna adanya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Keberadaan komunikasi dan informatika ini dibutuhkan oleh seluruh pihak, seperti pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Persandian

Urusan persandian dilaksanakan sebagai salah satu program kerja yang salah satunya adalah untuk meningkatkan layanan komunikasi dan informatika. Di Kabupaten Kediri, urusan persandian memiliki beberapa tugas dan fungsi: layanan monitoring trafik elektronik, layanan penanganan insiden keamanan teknologi informasi dan komunikasi, serta mengelola berita sandi yang diterima dari pusat, provinsi, maupun daerah lain.

Sebagai penyedia layanan komunikasi dan informatika, melalui urusan persandian, memerlukan kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring trafik elektronik. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan adanya jaringan komputer, yaitu membentuk sistem yang terdiri dari komputer yang didesain untuk berkomunikasi dan mengakses informasi melalui laman situs. Untuk mencapai layanan komunikasi dan akses informasi yang baik, maka monitoring trafik elektronik perlu dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat trafik pada sebuah jaringan yang memberikan laporan berdasarkan trafik jaringan elektronik. Setelah mengetahui keadaan trafik elektronik, maka pemerintah daerah dapat mengambil strategi pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan pelayanan komunikasi dan informatika.

Selain melakukan monitoring trafik elektronik, pemerintah daerah juga menjalankan fungsi layanan penanganan insiden keamanan teknologi informasi dan komunikasi melalui urusan persandian. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan penyampaian

informasi dan komunikasi yang aman dan mudah bagi masyarakat. Di samping itu, terdapat pula fungsi pengelolaan berita sandi, baik berita sandi yang diterima oleh pemerintah daerah dari pusat, provinsi, maupun daerah lain. Hal tersebut menjamin keamanan penyampaian informasi dan memastikan informasi diterima oleh perangkat daerah yang terkait sehingga informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan dengan lancar.

Statistik

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kabupaten Kediri bekerja sama dengan BPS Kabupaten Kediri untuk merangkum berbagai statistik Kabupaten Kediri yang merupakan indikator atau tolok ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kabupaten Kediri. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain buku Kabupaten Kediri Dalam Angka buku PDRB Kabupaten Kediri. Buku Kabupaten Kediri Dalam Angka pada dasarnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional setiap tahun. Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Kabupaten Kediri juga menyediakan buku PDRB Kabupaten Kediri menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Kabupaten Kediri juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan.

Pencapaian kinerja mengacu pada Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Untuk mencapai sasaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran dan target masing masing indikator yang akan dicapai dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisa target yang telah dicapai pada masing-masing indikator sasaran dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Sesuai RPJMD 2016-2021, capaian kinerja sasaran dan tujuan Pemkab Kediri Tahun 2023 yang menjadi wewenang Dinas Kominfo bisa digambarkan dalam tabel berikut:

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat daerah

Dalam menyusun perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi saat ini telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan e-Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional e-Government. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah :

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam mendukung kinerja program pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan antara lain:

- a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal;
- b. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/seksi/subbagian;
- c. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai;
- d. Keselarasan dan sinergi program/kegiatan belum optimal.

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Perumusan indikator pembangunan yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap capaian Nasional/Internasional. Hal tersebut diantaranya disebabkan belum adanya fokus, sinkronisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota.

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat daerah

Tantangan Pelayanan Dinas Kominfo :

- a. Tuntutan keterbukaan informasi publik dan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana
- b. Pesatnya perkembangan TIK dan pemerataan infrastruktur TIK
- c. Tuntutan Transformasi digitalisasi pelayanan publik
- d. Tuntutan ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi sesuai standarisasi BSSN

Peluang Pelayanan Dinas Kominfo :

- a. Era keterbukaan yang mendorong kinerja perangkat daerah lebih optimal
- b. Reformasi dan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai program prioritas dan isu strategis pemerintah daerah
- c. Kesadaran masyarakat akan pentingnya statistik sektoral, informasi dan komunikasi

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) merupakan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Saat ini yang menjadi permasalahan dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Kediri yang dituangkan dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Jumlah aplikasi e-Government yang berfungsi baik menurun. Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa:
 - a. Pada Tahun 2021 terdapat 107 aplikasi dengan 81 aplikasi dengan kondisi baik dan 26 aplikasi dengan kondisi perlu mendapat perbaikan
 - b. Pada Tahun 2020 terdapat 101 aplikasi dengan 100 aplikasi dengan kondisi baik dan 1 aplikasi dengan kondisi perlu mendapat perbaikan
 - c. Pada Tahun 2019 terdapat 101 aplikasi dengan 100 aplikasi dengan kondisi baik dan 1 aplikasi dengan kondisi perlu mendapat perbaikan
 - d. Pada Tahun 2018 terdapat 99 aplikasi dengan 34 aplikasi dengan kondisi baik dan 65 aplikasi dengan kondisi perlu mendapat perbaikan

Pada Tahun 2023 dengan peningkatan penambahan aplikasi bagi pelayanan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika yaitu sejumlah 107 aplikasi sejalan pula dengan kebutuhan perbaikan aplikasi yang semakin meningkat yaitu 26 aplikasi. Hal ini terjadi karena sejumlah aplikasi yang umumnya berupa website SKPD sedang dilakukan pemeliharaan dan perbaikan. Pada umumnya beberapa aplikasi tersebut mengalami serangan siber baik virus ataupun malware sehingga harus disuspend dulu untuk dilakukan analisa dan perbaikan. Selanjutnya pengembangan aplikasi e-Government dilaksanakan sesuai dengan Road Map yang ada pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri yang dibuat pada tahun 2019 dan dievaluasi untuk setiap tahun menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

- 2) Belum optimalnya pelayanan informasi komunikasi publik yang ditandai dengan masih rendahnya nilai indeks kategori PPID beberapa tahun, yaitu nilai kategori "E"

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.3.1 Identifikasi Program/Kegiatan Yang Tercantum Rancangan Awal RKPD.

Hasil identifikasi dari program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri semua telah terakomodir dalam rancangan awal RKPD.

2.3.2 Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan.

Dari hasil pencermatan internal terdapat adanya perbedaan antara anggaran yang diusulkan (ideal) dengan anggaran pada rancangan RKPD. Walaupun adanya efisiensi anggaran tetapi tidak mengurangi target berdasarkan hasil pembahasan perencanaan kerja.

2.3.3 Catatan Penting

Perlu percepatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemutakhiran infrastruktur IT serta peningkatan indeks PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

2.3.4 Lampiran Tabel adalah sebagai berikut: Tabel 2.3

Tabel : 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Komunikasi dan Informatika										
1.1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				6.853.546.000					7.018.533.952	
1.1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4.601.875					4.601.875	
1.1.1.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.571.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.571.000	
1.1.1.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.030.875		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1.030.875	
1.1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				5.981.154.895					5.641.263.847	

1.1.2.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ds. Doko , Ngasem	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	4.453.031.020		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 OB	5.014.039.972	
1.1.2.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ds. Doko , Ngasem	Waktu administrasi pelaksanaan tugas ASN	13 bulan	1.076.400.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	175.500.000	
1.1.2.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	448.360.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	448.360.000	
1.1.2.0 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1.522.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1.522.000	
1.1.2.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	14 laporan	1.344.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18 laporan	1.344.000	
1.1.2.0 6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 laporan	497.875		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	497.875	
1.1.3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	118.200.000			Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 dokumen	118.200.000	
1.1.3.0 1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	2 dokumen	105.000.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	2 dokumen	105.000.000	

1.1.3.0 2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	12 laporan	13.200.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	12 laporan	13.200.000	
1.1.4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				265.824.730					565.824.730	
1.1.4.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	4 komponen	6.095.400		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	6.095.400	
1.1.4.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 peralatan/perengkapan	43.773.200		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	43.773.200	
1.1.4.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 peralatan	17.547.990		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 paket	17.547.990	
1.1.4.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 bahan	33.940.315		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	33.940.315	
1.1.4.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 barang cetak/penggandaan	36.772.825		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4 paket	36.772.825	
1.1.4.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 bahan	22.995.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	22.995.000	
1.1.4.0 7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	20 rapat koordinasi/konsultasi	104.700.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 rapat koordinasi/konsultasi	404.700.000	

1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									58.629.000	
1.1.5.0 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Ds. Doko , Ngasem	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	58.629.000	
1.1.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				416.279.500					562.529.500	
1.1.6.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ds. Doko , Ngasem	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	2.400.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2.400.000	
1.1.6.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ds. Doko , Ngasem	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	413.879.500		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	413.879.500	
1.1.6.0 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ds. Doko , Ngasem					Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	146.250.000	
1.1.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				67.485.000					67.485.000	
1.1.6.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	14 unit	30.000.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 unit	30.000.000	
1.1.6.0 2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 peralatan/mesin	37.485.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	16 unit	37.485.000	

1.2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik				4.954.195.000					8.970.351.650	
1.2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4.954.195.000					8.970.351.650	
1.2.1.0 1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah peserta Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	60 orang	46.335.450		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	12 dokumen	407.289.500	
1.2.1.0 2	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah peserta Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	80 orang	44.496.500		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	5 dokumen	230.230.500	
1.2.1.0 3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah konten yang dikelola	875 konten	85.000.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	500 dokumen	295.600.000	
1.2.1.0 4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah pembinaan kelompok informasi masyarakat dan jaringan komunikasi	6 kegiatan	84.934.175		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	46 dokumen	3.260.714.650	
1.2.1.0 5	Pelayanan Informasi Publik	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah kerja sama dengan media elektronik dan portal online	40 media elektronik dan portal online	2.364.464.650		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	6 dokumen	160.886.125	
1.2.1.0 6	Layanan Hubungan Media	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah kerja sama dengan media cetak	45 media cetak	2.195.323.125		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah layanan hubungan media	45 layanan	3.812.323.125	

1.2.1.0 7	Kemitraan dengan pemangku kepentingan						Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan	16 dokumen	316.927.175	
1.2.1.0 8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah peserta pelatihan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	80 orang	42.686.600		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	70 orang	189.670.575	
1.2.1.0 9	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah peserta pelatihan SDM dan Sinkronisasi PPID	170 orang	57.408.000						
1.2.1.1 0	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah peserta Bakoimas	130 orang	33.546.500						
1.2.1.1 1	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota						Ds. Doko , Ngasem	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	1 unit	296.710.000	
1.3	<i>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</i>				4.844.444.000					8.452.691.600	
1.3.1	<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				58.415.000					58.415.000	
1.3.1.0 1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah nama domain/sub domain yang terdaftar	200 domain/sub domain	4.055.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota	1 domain	4.055.000	

1.3.1.0 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah nama domain/sub domain yang terpelihara	200 domain/sub domain	54.360.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 dokumen	54.360.000	
1.3.2	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				4.786.029.000					8.394.276.600	
1.3.2.0 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	-	-		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen hasil penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	120.000.000	
1.3.2.0 2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Ds. Doko , Ngasem	Uptime layanan Pusat Data untuk SKPD Kabupaten Kediri	95%	3.541.298.400		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	1 unit	3.570.548.400	
1.3.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah virtual meeting yang menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah	125 kegiatan	38.250.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	1 dokumen	104.250.000	
1.3.2.0 4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	17 aplikasi	309.999.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	10 unit	445.099.000	
1.3.2.0 5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan pemerintah	Ds. Doko , Ngasem	Prosentase aplikasi terintegrasi SPBE Kabupaten Kediri	20%	100.000.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah layanan pubik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1 layanan	100.000.000	

1.3.2.0 6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah aparatur/masyarakat yang mengikuti pelatihan TI	70 aparatur, 80 masyarakat	75.539.600		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	8 dokumen	760.837.200	
1.3.2.0 7	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah infastruktur teknologi informasi yang terpelihara baik	6 paket	422.942.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi dan komunikasi pemerintah daerah	6 dokumen	2.995.542.000	
1.3.2.0 8	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen arsitektur SPBE	1 paket dokumen arsitektur SPBE	177.750.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen	177.750.000	
1.3.2.0 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE Kabupaten Kediri	1 kegiatan	120.250.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	120.250.000	
2	Statistik										
2.1	<i>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</i>				275.810.000					545.810.000	
2.1.1	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>				275.810.000					545.810.000	
2.1.1.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 kegiatan	149.999.855		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan , analisis dan diseminasi data statistik sektoral	3 dokumen	419.999.855	

2.1.1.0 2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah koordinasi perihal membangun metadata statistik sektoral	2 kegiatan	125.810.145		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 dokumen	125.810.145	
3	Persandian										
3.1	<i>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</i>				544.828.000					714.828.000	
3.1.1	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				544.828.000					714.828.000	
3.1.1.0 1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Ds. Doko , Ngasem	Jumlah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang aman	1 paket	544.828.000		Ds. Doko , Ngasem	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	6 laporan	714.828.000	
Total					17.472.823.000		Total			25.702.215.20 2	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan (decision making) untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu proses atau perencanaan yang sering dilakukan dalam melakukan pembangunan adalah dengan menggunakan sistem pembangunan yang bersifat Bottom-Up. Bottom-Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator dalam hal ini atasan merupakan pemerintah dan bawahan merupakan masyarakat, swasta serta pemangku kepentingan.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri pada saat ini belum ada jaring aspirasi DPRD Kabupaten Kediri terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dalam hal ini belum ada usulan aspirasi masyarakat yang ikut berperan serta dalam Pembangunan Kabupaten Kediri yang diwakilkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Terkait usulan sektoral Kabupaten Kediri yaitu program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dengan kegiatan akses internet dan jaringan interkoneksi pendukung Kabupaten Kediri Online bagi seluruh SKPD Kabupaten Kediri, dengan output kegiatan terwujudnya jaringan internet dengan menggunakan fiber optik di Kabupaten Kediri dapat kami akomodir melalui program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2023, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila usulan dimasukan melalui mekanisme usulan bantuan keuangan yang nantinya akan diputuskan oleh BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Kediri.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023

KABUPATEN KEDIRI

Tabel 2.4

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.018.533.952	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.601.875	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	5.641.263.847	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	118.200.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.824.730	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	58.629.000	

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	562.529.500	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	67.485.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			8.970.351.650	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah informasi yang dikelola	8.970.351.650	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			8.452.691.600	
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah nama domain dan sub domain di lingkup pemerintah daerah yang dikelola	58.415.000	
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang dikelola	8.394.276.600	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			545.810.000	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah	545.810.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN			714.828.000	

	INFORMASI				
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ds. Doko, Ngasem	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	714.828.000	
Jumlah				25.702.215.202	

Tabel 2.4

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Untuk mengkonsentrasikan pada transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020-2024 yang menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2023 diarahkan untuk:

- a) Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Mewujudkan public service delivery yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;
- c) Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services); dan
- d) Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/e-commerce).

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
- c. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

- a. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
- b. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
- c. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
- d. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- b. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- c. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- d. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
- e. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas
- f. pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- g. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
- h. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- i. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
- j. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- k. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Selaras dengan kebijakan nasional, arah kebijakan pembangunan bidang informasi dan komunikasi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yang digunakan sebagai acuan perencanaan tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan publik yang berbasis e-Government melalui penataan kelembagaan, pembangunan infrastruktur dan sistem aplikasi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang lebih aktif dan professional untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi public
3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi desa melalui pemberdayaan kelompok informasi masyarakat
4. Peningkatan publikasi dan diseminasi informasi baik melalui media pemerintah, media massa, maupun media sosial

5. Pemberdayaan informasi masyarakat melalui publikasi isu-isu strategis dalam kegiatan Bakoinmas, pertunjukan rakyat, atau festival.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan di bidang Persandian dan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
3. Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
6. Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
7. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
8. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Strategi yang ditempuh untuk menjalankan tupoksi tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan koordinasi/ konsultasi secara vertikal/ horisontal dalam rangka penyusunan program penyelenggaraan komunikasi dan informatika serta urusan statistik;
2. Peningkatan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penataan secara kelembagaan, infrastruktur, dan aplikasi;
3. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui pelatihan dan sosialisasi;

4. Peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik melalui peran PPID;
5. Penyebarluasan isu strategis melalui kesenian dan budaya;
6. Pelaksanaan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat;
7. Peningkatan kerjasama media massa baik media cetak, media elektronik maupun portal online untuk mendukung publikasi dan diseminasi informasi
8. Memaksimalkan fungsi media pemerintah website dan media sosial untuk mendukung penyebaran informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1.2.1 Tujuan

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaran bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mengemban Visi Bupati Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasional-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani”, sebagai penjelasannya:

Maju

Suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Kediri dengan semakin meningkatnya daya saing daerah yang diiringi dengan kemajuan pembangunan kawasan, sumber daya manusia, birokrasi pemerintahan, layanan publik, serta dukungan teknologi yang unggul.

Berkarakter Nasional Religius

Merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, gotong-royong, norma agama, social budaya sehingga menempatkan pribadi sebagai manusia yang beradab dalam bingkai Pancasila.

Sejahtera

Merupakan kondisi masyarakat Kediri yang memiliki taraf hidup yang baik dan mampu memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak melalui kegiatan keseharian yang mapan.

Ekonomi Kerakyatan

Merupakan sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada peran

masyarakat dengan mempergunakan sumber daya ekonomi local yang tumbuh menjadi satu kesatuan pembangunan ekonomi daerah.

Birokrasi Yang Melayani

Merupakan kondisi birokrasi pemerintahan yang memenuhi sebagian besar reformasi birokrasi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk bertransformasi menjadi pelayan publik yang baik sekaligus mitra dan pengayom masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan Kediri.

Berdasarkan Visi tersebut terwujud dalam upaya-upaya pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasional-Religius
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
3. Pengembangan Ekonomi Karakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
6. Optimalisasi Kepariwisata berbasis Kearifan Lokal
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Upaya mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
2. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Perwujudan visi dan misi Kabupaten Kediri yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sejalan dengan tujuan utama Kemenkominfo , sebagai tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

terimplementasi sebagai berikut: “Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, dengan indikator : indeks Reformasi Birokrasi”.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut: Dinas Kominfo Kabupaten Kediri mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri bidang informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD yaitu “Meningkatkan Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public, dengan indikator: Indeks SPBE”.

1.2.2 Sasaran

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Kominfo Kabupaten Kediri menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Kominfo sebagai berikut :

1. Meningkatnya OPD yang berbasis e-Government
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya OPD yang berbasis e-Government

Indikator Kinerja Sasaran :

- Persentase OPD yang berbasis e-government
- Jumlah ruang publik yang terlayani free wifi
- Tingkat kecepatan konektivitas jaringan internet Pemkab

2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik

Indikator Kinerja Sasaran :

- Persentase desa yang membentuk KIM
- Persentase PPID aktif pada OPD

3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap media pemerintah

Indikator Kinerja Sasaran :

- Jumlah hasil-hasil pembangunan daerah yang terpublikasi
- Jumlah update pada media pemerintah daerah
- Jumlah pengunjung website resmi milik Pemkab

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Kediri termasuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, maka langkah-langkah operasional strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dituangkan ke dalam program-program komunikasi dan informasi serta program statistik yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Program tersebut berisi satu atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2023 yaitu sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 46 sub kegiatan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- b. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- c. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- d. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- e. Pelayanan Informasi Publik
- f. Layanan Hubungan Media
- g. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- h. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- i. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- c. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- d. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- f. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- g. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- h. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
- i. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Membangun Metadata Statistik Sektoral

V. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tahun 2023 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kediri mendukung program prioritas Kabupaten Kediri dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebesar Rp. 25.702.215.202,- dengan rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.5

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN KEDIRI**

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				24.441.577.202				24.441.577.202
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.018.533.952				7.018.533.952

2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.601.875			4.601.875
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	3 dokumen	3.571.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 dokumen	3.571.000
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 laporan	1.030.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 laporan	1.030.875
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.641.263.847			5.641.263.847
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	34 Orang/bu	5.014.039.972	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 Orang/bu	5.014.039.972
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Dokumen	175.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Dokumen	175.500.000

2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Dokumen	448.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	448.360.000
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Laporan	1.522.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	1.522.000
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	18 Laporan	1.344.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18 Laporan	1.344.000
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	2 Dokumen	497.875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	497.875
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik				118.200.000				118.200.000

	Daerah pada Perangkat Daerah								
2.16.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	2 dokumen	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	105.000.000
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 laporan	13.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	13.200.000
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				565.824.730				565.824.730
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	4 Paket	6.095.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	6.095.400
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	4 Paket	43.773.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	43.773.200
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	4 Paket	17.547.990	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	17.547.990

2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	4 Paket	33.940.315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	33.940.315
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	4 Paket	36.772.825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	36.772.825
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Dokumen	22.995.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	22.995.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Laporan	404.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	404.700.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				58.629.000				58.629.000
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	6 Unit	58.629.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Unit	58.629.000
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				562.529.500				562.529.500

	Daerah								
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Laporan	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.400.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Laporan	413.879.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	413.879.500
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Laporan	146.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	146.250.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				67.485.000				67.485.000
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	16 Unit	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	30.000.000

2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	16 Unit	37.485.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Unit	37.485.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				8.970.351.650				8.970.351.650
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8.970.351.650				8.970.351.650
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Dokumen	407.289.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	407.289.500
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	5 Dokumen	230.230.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	230.230.500
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	500 Dokumen	295.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		500 Dokumen	295.600.000

		Publik							
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	46 Dokumen	3.260.714.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		46 Dokumen	3.260.714.650
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	6 Dokumen	160.886.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	160.886.125
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	45 Layanan	3.812.323.125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Layanan	3.812.323.125
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	16 Dokumen	316.927.175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		16 Dokumen	316.927.175
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	70 Orang	189.670.575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		70 Orang	189.670.575
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Unit	296.710.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	296.710.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN				8.452.691.600				8.452.691.600

	APLIKASI INFORMATIKA								
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				58.415.000				58.415.000
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Domain	4.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Domain	4.055.000
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	100 Dokumen	54.360.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	54.360.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8.394.276.600				8.394.276.600

2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Dokumen	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	120.000.000
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Unit	3.570.548.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	3.570.548.400
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Dokumen	104.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	104.250.000
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	10 Unit	445.099.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 Unit	445.099.000
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Layanan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	100.000.000

		Pemerintah Daerah							
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	8 Dokumen	760.837.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	760.837.200
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	6 Dokumen	2.995.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	2.995.542.000
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Dokumen	177.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	177.750.000
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Dokumen	120.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	120.250.000
2.20	URUSAN				545.810.000				545.810.000

	PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				545.810.000				545.810.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				545.810.000				545.810.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	3 Dokumen	419.999.855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	419.999.855
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Dokumen	125.810.145	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	125.810.145
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				714.828.000				714.828.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				714.828.000				714.828.000

2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				714.828.000			714.828.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	6 Laporan	714.828.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Laporan	714.828.000
Jumlah					25.702.215.202	Jumlah		25.702.215.202

Tabel 2.5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Terkait dengan rencana kerja dan penandaan Perangkat Daerah pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Program dan Kegiatan	Belanja
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.018.533.952
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.601.875
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.571.000
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.030.875
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.641.263.847
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.014.039.972
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	175.500.000
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	448.360.000
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.522.000

e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.344.000
f	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	497.875
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	118.200.000
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah (BMD) SKPD	105.000.000
b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	13.200.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.824.730
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.095.400
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43.773.200
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17.547.990
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33.940.315
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36.772.825
f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22.995.000
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.700.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	58.629.000

a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58.629.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	562.529.500
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	413.879.500
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	146.250.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	67.485.000
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30.000.000
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37.485.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	8.970.351.650
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi yang terkelola	8.970.351.650
a	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	407.289.500
b	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	230.230.500
c	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	295.600.000
d	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3.260.714.650

e	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	160.886.125
f	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3.812.323.125
g	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	316.927.175
h	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	189.670.575
i	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	296.710.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	8.452.691.600
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah yang dikelola	58.415.000
a	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	4.055.000
b	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.360.000
2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi pemerintah daerah yang dikelola	8.394.276.600
a	Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000
b	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	3.570.548.400

c	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	104.250.000
d	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	445.099.000
e	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100.000.000
f	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	760.837.200
g	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.995.542.000
h	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	177.750.000
i	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	120.250.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	545.810.000
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah	545.810.000
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	419.999.855
b	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	125.810.145
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Cakupan keamanan persandian dan TI	714.828.000

	INFORMASI		
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi sandi dan sistem informasi yang aman	714.828.000
a	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	714.828.000
Jumlah			25.702.215.202

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berpedoman pada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja perangkat daerah memuat tujuan dan Sasaran Pencapaian Misi, Program dan Usulan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2023. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri selain menjadi Acuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 berfungsi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen beserta seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri kearah yang lebih baik dimasa datang.

Kediri, - - 2023

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kediri**

SRI ILHAM WAHYU SUBEKTI

Pembina Tingkat I

NIP. 19690223 198903 1 002

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA